PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 telah berakhir, sehingga perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

(1) Renja Kejaksaan Tahun 2024 terdiri atas:
   a. Buku Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024; dan
   b. Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2024.
(2) Buku Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
(3) Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 3

Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia yang sejalan dengan

visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden; dan

b. menyusun rencana kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja, bidang atau unit kerja sebagaimana Renja Kejaksaan Tahun 2024.

Pasal 4

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Atase Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2024.

(2) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.

(3) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.

(4) Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai berikut:
   a. laporan bulanan paling lambat pada tanggal terakhir dari setiap bulan;
   b. laporan triwulan pertama paling lambat pada tanggal 31 Maret;
   c. laporan triwulan kedua paling lambat pada tanggal 30 Juni;
   d. laporan triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 30 September; dan
   e. laporan triwulan keempat paling lambat pada tanggal 31 Desember.

(5) Selain disampaikan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Laporan Kinerja dan Anggaran juga dapat disampaikan secara sewaktu-waktu atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

Pasal 5

(1) Jaksa Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran triwulan, dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk disampaikan kepada:
   a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal diperlukan, Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2024 menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
(2) Penyusunan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

BUKU RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun kelima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renja Kejaksaan Tahun 2024 ini disusun pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2024 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan merupakan tahap akhir dari Pelaksanaan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, tahun 2015, tahun 2020, dan tahun 2025 serta Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP).

Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditujukan untuk menjaga

keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, PN Kejaksaan tahun 2024, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024 yaitu "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kejaksaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaan.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2024 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah PN dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara.

Dokumen RKP tahun 2024 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2024 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam PP yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
3. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2024 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2024 yang menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN melalui pelaksanaan sasaran strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, sasaran program untuk tingkat Eselon I, sasaran kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II, dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun lanjutan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dari tahun 2021. Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga pencapaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. mengimplementasikan kebijakan *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong K/L untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar K/L dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output dan outcome* program;
3. tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung *output* program sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/kegiatan/*output* mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan penerapan RSPP terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kejaksaan dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
   a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
   b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
   c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2024;
   d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
   e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*;
   f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
   g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
   h. Peradilan yang Fair *(Fair Trial)* bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
   i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif; dan
   j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
   a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
   b. Penanganan Perkara Siber;
   c. Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa;
   d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
   e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan
   f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk:

1. Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV) dalam penyusunan Renja Tahun 2024 dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program PN.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik kegiatan yang bersifat PN maupun prioritas Kejaksaan yang andal, profesional, proporsional, dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan prinsip *money follow function* dan *money follow program* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan tahun 2024.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional.

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, yang memuat Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2024, Rekomendasi Hasil Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2023, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2023.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, yang memuat tentang sasaran dan

arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika

pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19), dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitaliasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi ekonomi yang inklusif ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
   - pertumbuhan ekonomi;
   - tingkat pengangguran terbuka;
   - rasio gini; dan
   - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
   - indeks pembangunan manusia; dan
   - tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *Decent Job*;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons terhadap Perubahan Iklim);
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
   - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
   - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
   - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.

2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
   - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
   - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
   - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
   - Memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
   - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
   - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
   - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon; dan
   - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
   - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
   - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital; dan
   - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan atau Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024, kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2024. 7 (tujuh) PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan berlanjut pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. 7 (tujuh) PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detail dari PN dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian 7 (tujuh) PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan

kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan, dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.

C. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Apabila merujuk pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024, PN ke-7 yaitu "*Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)*" tahun 2024 tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2024 maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2024 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, dan belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam

pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi *digital signature* dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing aparatur penegak hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/*Major Project* (MP), yaitu:

1. Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT, merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2023 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024. Detail kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

RKP Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2024 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, dan difokuskan mampu mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045, dengan tema ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pembangunan pada tahun 2024 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia baru saja merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II tahun 2023. Tercatat ekonomi Indonesia bertumbuh 5,17% secara y-o-y, naik dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,04%. Selain itu pertumbuhan ekonomi domestik yang positif diharapkan dapat meredam potensi resesi global di semester II tahun 2023, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun, Indonesia akan segera memasuki masa persiapan perhelatan politik di awal 2024. Untuk itu, perlu mendorong kinerja Kejaksaan lebih masif dalam mengawal percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesi Pemilu 2024. Oleh karena 2024 merupakan tahun politik, dan momentum ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan dapat merestrukturisasi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka hal ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional pula.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya dikhususkan untuk mengatasi pemulihan dari krisis, namun juga untuk mempertahankan dan meningkatkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 atau yang kita sebut Indonesia Emas dan keluar dari apa yang dinamakan dengan “*Middle Income Trap*”. Percepatan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan menghadapi tahun politik 2024 maupun terhadap perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence*

(AI) dan *big data*, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2024 mengedepankan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, tema RKP Tahun 2024 mengedepankan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2024. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2024 sangat tegas memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, stabilitas ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan ekonomi, dan apabila terdapat suasana inkondusif yang disebabkan oleh adanya hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan maka hal tersebut jelas merupakan masalah besar bagi tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparatur untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, Renja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema "Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini mencerminkan bahwa institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dan dapat mendukung produktivitas untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 yaitu "KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN

KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

Visi dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal : Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas : Aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada tahun 2024 aparat Kejaksaan dapat menjadi andal, profesional, inovatif, dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1, 6, 7, dan 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kejaksaan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Kejaksaan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan;
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan berbasis Teknologi Informasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan untuk periode tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan;
2. Mewujudkan Aparatur Kejaksaan yang Akuntabel dan Berintegritas;
3. Meningkatkan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; dan
6. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Kemudian dalam rangka menyongsong tahun 2024, Jaksa Agung juga menyampaikan 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung yang pertama kali disampaikan pada Hari Bakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023 kepada seluruh Aparatur Kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan dan menyukseskan tahun politik, serta tahun pelaksanaan RPJMN terakhir periode RPJMN 2020-2024.

1. Aktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.
2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi.
7. Jaga netralitas personel dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2024.

D. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2024

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah seluruh unit kerja Kejaksaan, termasuk di pusat dan daerah dalam rangka penyusunan draf rencana kerja dan anggaran Kejaksaan pada tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam pagu indikatif. Hasil dari Musrenbang ini menjadi bahan bagi Jaksa Agung dalam menghadiri Musrenbang Nasional/Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat berdasarkan siklus perencanaan dan pembangunan.

Pramusrenbang merupakan pendahulu sebelum dilaksanakannya Musrenbang. Pramusrenbang adalah forum musyawarah pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk menyusun draf rencana kerja anggaran satuan kerja tahun 2024 sesuai

dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan. Sama halnya dengan Musrenbang, Pramusrenbang bertujuan menyiapkan draf rencana kerja anggaran tahun 2024 sesuai ketersediaan pagu indikatif.

Penyusunan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 disusun dengan melibatkan bidang-bidang lingkup Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan di luar negeri pada Musrenbang Kejaksaan Tahun 2023 dan rapat *Trilateral Meeting* antara Kejaksaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Mei 2023, selain itu anggaran Kejaksaan TA 2024 juga disusun per program dan kegiatan PN.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 sebesar Rp10.002.179.171.000,00 (sepuluh triliun dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Pagu Indikatif TA 2024 dibagi dengan struktur rincian anggaran sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan program yaitu:
   a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum direkomendasikan sebesar Rp636.013.090.000,00; dan
   b. Program Dukungan Manajemen direkomendasikan sebesar Rp9.366.166.081.000,00.
2. Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan yaitu:
   a. Rupiah Murni (RM) direkomendasikan sebesar Rp8.181.903.540.000,00;
   b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direkomendasikan sebesar Rp376.300.000.000,00;
   c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) direkomendasikan sebesar Rp1.124.433.750.000,00; dan
   d. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) direkomendasikan sebesar Rp319.541.881.000,00.
3. Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Jenis Belanja yaitu:
   a. Belanja Pegawai direkomendasikan sebesar Rp5.104.720.818.000,00 mencapai 51,04%;
   b. Belanja Barang direkomendasikan sebesar Rp3.453.482.722.000,00 mencapai 34,53%; dan
   c. Belanja Modal direkomendasikan sebesar Rp1.443.975.631.000,00 mencapai 14,44%.

Berdasarkan Rekomendasi Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 yang disusun per program maka penyusunan rinciannya sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum direkomendasikan pagu indikatif TA 2024 sebesar Rp912.829.842.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang kemudian dari hasil rapat *Trilateral Meeting* terdapat usulan Pagu PN TA 2024 per program sebesar Rp33.376.188.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian kegiatan antara lain:

a. Bidang Intelijen pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp104.460.770.000,00 (seratus empat miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   - Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan rincian antara lain:
     1) Laporan Hasil Kegiatan Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana;
     2) Laporan Hasil Kegiatan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
     3) Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan;
     4) Laporan Hasil Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen;
     5) Kegiatan *Monitoring Center*;
     6) Kegiatan *Monitoring Sinyal*;
     7) Kegiatan *Digital Forensic*;
     8) Kegiatan *Tactical Passive*;
     9) Kegiatan Operasional Kontra Penginderaan dan *Scanning;*
     10) Kegiatan *Adhyaksa Command Center*;
     11) Laporan Hasil Kegiatan Rencana Aksi;
     12) Operasi Intelijen Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
     13) Posko Bandara/Pelabuhan;
     14) Penerangan Hukum;
     15) Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat;
     16) Jaksa Menyapa di Radio dan Televisi;
     17) Pelayanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum; dan
     18) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan.

   - Kegiatan Bidang Intelijen di satker daerah dengan rincian antara lain:
     1) Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan;
     2) Penelusuran Aset Terkait Tindak Pidana;
     3) Posko Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos;
     4) Pengamanan Pembangunan Strategis;
     5) Penerangan Hukum;
     6) Penyuluhan Hukum berupa Jaksa Masuk Sekolah;
     7) Penyuluhan Hukum berupa Jaksa Menyapa/Om Jak Menjawab di Melalui Radio/Podcast/Televisi;
     8) Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
     9) Kegiatan Pencarian Buronan;
     10) Kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pilpres, dan Pilkada); dan
     11) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi.

b. Bidang Tindak Pidana Umum pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp321.589.376.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   - Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:
     1) Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda;
     2) Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya;

3) Penanganan Perkara Siber;
4) Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara;
5) Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
6) Bimbingan Teknis Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
7) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum melalui Keadilan Restoratif;
8) Pelaksanaan *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi;
9) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
10) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

- Untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker daerah yang akan dipergunakan untuk menangani 140.000 perkara di daerah serta 2.514 penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di 534 satker di daerah.

c. Bidang Tindak Pidana Khusus di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp392.814.786.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   - Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
     1) Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang;
     2) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai;
     3) Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti;
     4) Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Perkara;
     5) Prapenyidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat;
     6) Dukungan Kegiatan Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
     7) Pelaksanaan *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi;
     8) Pelacakan Aset dalam Rangka Pembayaran/Pelunasan Piutang Uang Pengganti (Sita Eksekusi) dengan Menggunakan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
     9) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

   - Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada satker di daerah yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, pada kegiatan prapenuntutan dan penuntutan

yang dibagi menjadi wilayah I, wilayah II, dan wilayah III. Jumlah kegiatan terdiri dari 1.581 perkara penyelidikan, 1.109 perkara penyidikan dan 1.217 perkara di tingkat prapenuntutan dan penuntutan di 534 satker di daerah.

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp26.347.526.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   - Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha di pusat dan daerah antara lain:
     1) Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum;
     2) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;
     3) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
     4) Biaya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Luar Negeri;
     5) Pos Pelayanan Hukum;
     6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menggunakan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
     7) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

   - Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di satker daerah, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 2.968 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 506 perkara, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 5.664 kegiatan.

e. Bidang Pidana Militer di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp15.024.440.000,00 (lima belas miliar dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   1) Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas;
   2) Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Koneksitas;
   3) Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas;
   4) Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas;
   5) Penyelesaian Praperadilan Perkara Koneksitas; dan
   6) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

f. Pemeliharaan barang bukti penanganan perkara di daerah direkomendasikan sebesar Rp52.592.944.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan dalam rangka menunjang penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan pidana militer pada satker Kejaksaan di daerah.

2. Program Dukungan Manajemen direkomendasikan pagu indikatif TA 2024 sebesar Rp9.089.349.329.000,00 (sembilan triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang kemudian dari hasil rapat

Trilateral Meeting terdapat usulan Pagu PN TA 2024 Per Program sebesar Rp96.694.773.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rekomendasi rincian kegiatan antara lain:

a. Bidang Pembinaan di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp6.819.322.474.000,00 (enam triliun delapan ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat intelijen, anggaran rutin pada biro-biro dan pusat, serta anggaran operasional Rumah Sakit Adhyaksa.

b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp2.079.717.337.000,00 (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   1) Pengadaan *Integrated Intelligence System of Attorney General* Indonesia (dari anggaran Pinjaman Luar Negeri) sebesar Rp1.124.433.750.000,00;
   2) Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial (dari anggaran SBSN) sebesar Rp319.541.881.000,00;
   3) Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Centre* (SOC) TA 2024 PN TA 2024) sebesar Rp65.000.000.000,00;
   4) Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus PN TA 2024) sebesar Rp10.000.000.000,00;
   5) Rehab dan Perluasan Gedung Kantor (Gedung Kantor Kejati/Kejari yang anggarannya pada tahun 2023 diblokir/*Automatic Adjustment*) sebesar Rp345.000.000.000,00;
   6) Renovasi Rumah Dinas dan Meubelair Satker Daerah IKN sebesar Rp8.000.000.000,00;
   7) Pengadaan *Speedboat* untuk Penanganan Perkara (dari anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp19.000.000.000,00;
   8) Kendaraan Tahanan Khusus sebesar Rp18.000.000.000,00;
   9) Kendaraan Tahanan Satker Daerah (dari anggaran PNBP) sebesar Rp70.122.000.000,00;
   10) Sarpras Rutin di Biro Perlengkapan sebesar Rp5.000.000.000,00;
   11) Mobil Dinas Listrik Eselon I dan II serta Operasional Kantor IKN sebesar Rp65.274.570.000,00;
   12) Motor Listrik Operasional Kantor IKN sebesar Rp5.600.000.000,00;
   13) Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Satker Daerah sebesar Rp7.165.485.000,00;
   14) Meubelair dan Fasilitas Perkantoran Satker Daerah sebesar Rp5.072.448.000,00; dan

15) Genset (dari anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp12.507.203.000,00.

c. Bidang Pengawasan di pusat dan daerah direkomendasikan sebesar Rp27.284.647.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   - Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan antara lain:
     1) Kegiatan Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi;
     2) Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus;
     3) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan; dan
     4) Inspeksi Umum, Pemantauan, inspeksi Pimpinan, Inspeksi Kasus, Inspeksi Khusus, Supervisi, *Video Conference* Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan Jajaran Pengawasan di Daerah, Pelaksanaan *Whistleblowing System*, Pelaksanaan Zona Integritas, Tim Saber Pungli dan Satgas 53 serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

   - Kegiatan tugas dan fungsi peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah antara lain:
     1) Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi;
     2) Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus;
     3) Pelaksanaan Inspeksi Umum dan Pemantauan; dan
     4) Jumlah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan direkomendasikan sebesar Rp163.024.871.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari kegiatan berikut:
   - Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) dan Belanja Barang Operasional Rutin Kebutuhan-Kebutuhan Dasar untuk Layanan Perkantoran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti);
   - Pendidikan dan Pelatihan PN;
   - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
   - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
   - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
   - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional lainnya; dan
   - Program Pendidikan Beasiswa.

Adapun rekomendasi Kegiatan PN pada pagu indikatif TA 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri direkomendasikan sebesar Rp20.650.700.000,00;
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika direkomendasikan sebesar Rp2.100.000.000,00;

3. Kegiatan Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif direkomendasikan sebesar Rp2.800.000.000,00;
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 direkomendasikan sebesar Rp2.458.250.000,00;
5. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup direkomendasikan sebesar Rp820.000.000,00;
6. Kegiatan Penanganan Perkara Siber direkomendasikan sebesar Rp4.547.238.000,00;
7. Kegiatan Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I direkomendasikan sebesar Rp10.000.000.000,00;
8. Kegiatan Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Centre* (SOC) TA 2024 direkomendasikan sebesar Rp65.000.000.000,00;
9. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara direkomendasikan sebesar Rp8.800.000.000,00;
10. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak direkomendasikan sebesar Rp2.230.042.000,00;
11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice* direkomendasikan sebesar Rp1.939.042.000,00;
12. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset direkomendasikan sebesar Rp1.939.042.000,00;
13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme direkomendasikan sebesar Rp969.521.000,00;
14. Kegiatan Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum direkomendasikan sebesar Rp1.939.042.000,00;
15. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif direkomendasikan sebesar Rp969.521.000,00; dan
16. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup direkomendasikan sebesar Rp2.908.563.000,00.

Adapun rekomendasi hasil Musrenbang adalah sebagai berikut:

1. Masukan POKJA I terkait Pemindahan Kantor Kejaksaan Agung ke IKN
   a. Penempatan pegawai Kejaksaan di IKN
      Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan SDM yang akan ditempatkan pada IKN dengan jumlah sebanyak 563 pegawai, dengan perincian sebagai berikut:
      1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan: 186 pegawai;
      2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen: 146 pegawai;
      3) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: 90 pegawai; dan
      4) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan: 141 pegawai.
   b. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional kantor Kejaksaan Agung di Balikpapan untuk mendukung operasional perkantoran sementara, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:
      1) *finishing* kegiatan rehab gedung kantor Kejaksaan Agung di Balikpapan;

2) sarana pendukung gedung kantor sementara Kejaksaan Agung (meubelair, *personal computer* (PC), laptop, jaringan internet, AC, dan peralatan inventaris kantor);
3) sarana pendukung rumah dinas Jaksa Agung, eselon I, eselon II, eselon III dan fungsional serta pelaksana (meubelair dan perlengkapan rumah);
4) kendaraan dinas untuk Jaksa Agung, eselon I, eselon II, dan eselon III;
5) kendaraan operasional lapangan meliputi *speedboat*, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2 untuk mobilitas pimpinan dan pegawai dari Balikpapan ke IKN;
6) renovasi dermaga;
7) renovasi mess sementara untuk pegawai di 2 lokasi (eks TK Adhyaksa dan eks rumah dinas); dan
8) pengamanan personil, pimpinan, dan material.

2. Masukan POKJA II terkait kegiatan Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2024
   a. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (peningkatan kapasitas SDM terkait dengan prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi dengan sasaran khusus Jaksa yang menangani perkara tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan).
   b. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan atau LIDPAMGAL).
   c. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait dengan adanya laporan pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh Bidang Tindak Pidana Khusus).
   d. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait pendampingan hukum keperdataan dalam proses Pemilu dan pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan).
   e. Merekomendasikan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia untuk merumuskan kembali dan mengusulkan rancangan anggaran dan kegiatan Pemilu dan pemilihan yang tidak dianggarkan oleh Bawaslu (terkait pendidikan dan pelatihan tindak pidana pemilu, tindak pidana pemilihan serta pendidikan dan pelatihan penyelesaian sengketa tata usaha negara).

3. Masukan POKJA III terkait Kegiatan PN dan Pembiayaan Kegiatan Non Rupiah Murni
   a. Mendorong Biro Perencanaan berkoordinasi dengan bidang-bidang pelaksana PN Kejaksaan Tahun 2024 untuk mereviu kembali kebutuhan anggaran PN Tahun 2024 untuk menjamin

proporsionalitas alokasi anggaran kegiatan-kegiatan lain baik operasional kantor, belanja pegawai maupun anggaran penegakan dan pelayanan hukum.

b. Keterbatasan sumber dana selalu menjadi tantangan perencanaan pembangunan. Kebijakan pendanaan pembangunan yang ekspansif sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah pada periode 2020-2024 ini menyebabkan sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan tidak hanya berasal dari penerimaan pajak dan pendapatan sah lainnya saja, tetapi pemerintah juga memanfaatkan berbagai sumber uang seperti pinjaman dalam negeri, Pinjaman Luar Negeri, penerbitan Surat Utang Negara dan SBSN dan PNBP. Mengingat untuk pertama kalinya Kejaksaan dapat memperoleh dana SBSN sebagai sumber pembiayaan Non Rupiah Murni, maka perlu untuk mempersiapkan secara maksimal pendirian Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa baik dari sisi susunan organisasi, tata kerja, proses bisnis, SDM, dan proses pengadaannya sehingga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pendirian RSU Adhyaksa di wilayah-wilayah lainnya.
c. Mendorong adanya pendampingan atau pengawalan dari unit Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung selama proses pembangunan RSU Adhyaksa di Kabupaten Mojokerto.
d. Memprioritaskan penuntasan penyelesaian pembiayaan Pinjaman Luar Negeri *Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia* (IISAGI) pada tahun 2024 serta pemanfaatan dana Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024 secara akuntabel.
e. Mendorong penetapan dan capaian indikator-indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi *output* (kegiatan) melainkan juga *outcome* (manfaat) yang berbasis SMART *(Spesific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time Bound)* yang hendak dicapai dari pemanfaatan peralatan intelijen yang dibiayai dari dana PLN tersebut.
f. Mendorong pemetaan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional Tahun 2024 dengan tema ”Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” antara lain di bidang pengamanan investasi, hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi ekonomi kreatif yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pendampingan desa.
g. Mendorong pemetaan kerawanan pemilihan umum dan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) melalui optimalisasi Bank Data Intelijen dan Instrumen Pengolahan Data berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya *early warning detection*.
h. Mendorong optimalisasi pengamanan dan pendampingan proyek-proyek strategis nasional dan prioritas pemerintah lainnya yang diinisiasi oleh Kejaksaan sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
i. Mendorong transformasi pelayanan publik Kejaksaan antara lain melalui peningkatan indeksasi pelayanan publik, standar pelayanan publik, standardisasi kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau e-*service* termasuk penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan Kejaksaan guna memperoleh kepuasan publik.
j. Mendorong peningkatan kualitas instrumen-instrumen pengendalian internal melalui penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan lain sebagainya antara lain melalui penyusunan regulasi internal sebagai landasan operasional dan standardisasi penyelenggaraannya yang lebih memitigasi fungsi dan peran bidang kerja, serta kesempatan mengikuti pendidikan dan sertifikasi auditor sesuai standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

k. Mendorong inventarisasi, penyempurnaan, dan penetapan indikator kunci kinerja (*key performance indicators*) yang terdiri dari IKU (Indikator Kinerja Utama), IKI (Indikator Kinerja Individu), indeksasi pengelolaan kelembagaan, perintah direktif Presiden, Rencana Aksi Nasional, Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, serta indikator-indikator strategis lainnya sehingga diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menampilkan kinerja Kejaksaan kepada pemerintah maupun organisasi-organisasi donor.

l. Mendorong penyusunan dan pengusulan Rencana Aksi Nasional berkaitan dengan prioritas-prioritas pemerintah yang menjadi lingkup kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan dimana Kejaksaan dapat berperan sebagai *leading sector* antara lain terkait dengan penanganan perkara koneksitas.

4. Masukan POKJA IV terkait kegiatan Kejaksaan dalam penanganan perkara dan belanja rutin lainnya:
   a. Intelijen:
      1) memprioritaskan kegiatan pemantauan Pemilu 2024;
      2) menganggarkan sarana, prasarana, operasional kegiatan, serta pemeliharaan *podcast* di Kejaksaan Tinggi;
      3) Keputusan Presiden tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sudah selesai pembahasan dan akan terbit pada tahun 2023;
      4) Keputusan Presiden terkait Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar;
      5) makan di luar jam kerja, *safe house*, biaya ahli, dan lain-lain diusulkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) oleh Bidang Intelijen ke Bidang Pembinaan;
      6) biaya pengamanan sumber daya organisasi agar dianggarkan;
      7) kegiatan kehumasan untuk membiayai kegiatan yang mengundang wartawan;
      8) anggaran kegiatan penyelidikan dan perkiraan keadaan (Kirka) agar dianggarkan lebih banyak minimal 10 (sepuluh) kegiatan;
      9) *update software*, perpanjangan *license* aplikasi, pemeliharaan untuk alat-alat intelijen agar dianggarkan;
      10) biaya perpanjangan *license* senjata dinas;
      11) anggaran penelusuran aset dianggarkan sampai ke Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri; dan
      12) anggaran digitalisasi pelayanan penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

   b. Tindak Pidana Umum:
      1) usulan anggaran *test kit* narkotika untuk seluruh satker;
      2) usulan anggaran untuk alat timbang barang bukti;

3) anggaran Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) berupa *test urine* untuk seluruh pegawai Kejaksaan sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022;
4) anggaran pidana umum disesuaikan kondisi geografis di daerah;
5) anggaran sarana dan prasarana gudang barang bukti untuk kapal laut;
6) anggaran penyidikan kehutanan belum dianggarkan di satker daerah;
7) anggaran penghancur satuan barang berupa pakaian bekas yang sudah dikemas (balpres) untuk dianggarkan; dan
8) operasional dan pemeliharaan rumah *restorative justice* untuk dianggarkan.

c. Tindak Pidana Khusus:
1) kegiatan menangani tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai perkara tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan belum dianggarkan, serta belum ada struktur organisasi, anggaran dimasukkan ke struktur yang sudah ada baik di pusat dan di daerah;
2) dukungan anggaran monitoring dan evaluasi penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi;
3) Penetapan Status Penggunaan (PSP) agar dianggarkan biaya pemeliharaan dan operasional; dan
4) biaya ahli diusulkan SBML oleh Bidang Tindak Pidana Khusus kepada Bidang Pembinaan.

d. Perdata dan Tata Usaha Negara:
1) bantuan hukum nonlitigasi dan tindakan hukum lainnya untuk dianggarkan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri; dan
2) biaya ahli diusulkan SBML oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Bidang Pembinaan.

e. Pidana Militer:
1) kegiatan pengamanan aset untuk dianggarkan;
2) anggaran laboratorium pengujian alat utama sistem keamanan semesta (alutsista) untuk dianggarkan;
3) kegiatan penyidikan dan kegiatan lainnya di luar negeri belum dianggarkan;
4) anggaran Asisten Pidana Militer yang membawahi lebih dari satu Kejaksaan Tinggi agar dibedakan anggarannya dengan yang hanya membawahi satu Kejaksaan Tinggi;
5) biaya penerimaan laporan pengaduan (lapdu) dan biaya koordinasi untuk dianggarkan dan ditingkatkan terutama yang di kepulauan;
6) tambahan anggaran untuk bimbingan teknis, sosialisasi, dan *focus group discussion* terkait tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pidana Militer;
7) biaya ahli diusulkan SBML oleh Bidang Pidana Militer kepada Bidang Pembinaan; dan
8) anggaran dukungan Bidang Pidana Militer kepada bidang lain di Kejaksaan seperti bantuan dalam perlawanan terhadap putusan arbitrase di Singapura agar dapat dianggarkan.

f. Pengawasan:
   1) pelaksanaan inspeksi umum, khusus, dan pemantauan anggaran untuk ditingkatkan;
   2) penyelenggaraan SPIP untuk dianggarkan;
   3) peningkatan kapasitas auditor untuk dianggarkan;
   4) sosialisasi kode etik Jaksa untuk dianggarkan;
   5) pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan kode etik dan perilaku Jaksa; dan
   6) anggaran pemeriksaan satker di luar negeri untuk dianggarkan.

g. Pendidikan dan Pelatihan:
   1) penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebanyak 700 orang untuk dianggarkan;
   2) kebutuhan anggaran pada Sentra Pendidikan dan Pelatihan untuk Pendidikan dan Pelatihan *Refreshing Course* KUHP untuk ditingkatkan anggarannya;
   3) kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Tahun 2024 belum dianggarkan;
   4) kebutuhan Program Kerja Sama Beasiswa dengan Perguruan Tinggi Nasional untuk ditingkatkan anggarannya; dan
   5) 9 (sembilan) pendidikan dan pelatihan tematik untuk dianggarkan.

h. Pembinaan:
   Penyelenggaraan PraRakernas untuk dianggarkan:
   1) penyusunan laporan keuangan;
   2) penyusunan peraturan Kejaksaan, harmonisasi, dan sosialisasi;
   3) penempatan *secondment* di lembaga internasional;
   4) rekrutmen dan pengangkatan pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
   5) penyelenggaraan seleksi mengikuti pendidikan dan pelatihan;
   6) pemeliharaan gedung dan halaman, serta inventaris kantor;
   7) penyelenggaraan layanan kearsipan;
   8) pengadaan kendaraan dinas operasional dan jabatan di IKN;
   9) renovasi;
   10) sosialisasi/bimbingan teknis terkait Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan sebagainya;
   11) pendampingan penyelesaian barang sita eksekusi;
   12) penelusuran aset di luar negeri;
   13) penyusunan kajian analisis kebijakan;
   14) kendaraan dinas Asisten Pidana Militer belum dianggarkan;
   15) rumah dinas Asisten Pidana Militer;
   16) mengkaji tunjangan para pegawai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melaksanakan tugas di Bidang Pidana Militer di pusat dan daerah;
   17) belanja pegawai pusat TA 2024 diserahkan ke masing-masing satker eselon I; dan
   18) mengkaji tunjangan khusus wilayah pulau-pulau terpencil terluar atau wilayah perbatasan;

E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2024

Penyelenggaraan kegiatan rapat konsolidasi diisi dengan pemaparan dari para Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian (Sunproglapnil) tentang hasil pembahasan dan rekomendasi Rapat Kerja Teknis masing-masing bidang/badan Kejaksaan Tahun 2023.

1. Berdasarkan pemaparan tersebut, rapat menyimpulkan sejumlah usulan langkah tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Teknis masing-masing bidang/badan Kejaksaan Tahun 2023 terkait dengan optimalisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut:
   a. Penyusunan Regulasi dalam rangka Penguatan Tata Kelola Dukungan Manajemen serta Pelayanan dan Penegakan Hukum

      Untuk itu perlu menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan koordinasi dengan bidang/badan terkait dalam rangka menyusun regulasi mengenai:
      1) tata kelola Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan;
      2) tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
      3) Standar Biaya Khusus berupa Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun SBML untuk mengakomodir kebutuhan biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM);
      4) standardisasi kebutuhan sarana prasarana satuan kerja Kejaksaan;
      5) sita aset untuk pembayaran restitusi dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang berorientasi pada pemulihan korban tindak pidana;
      6) pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat termasuk terhadap pecandu, korban, dan penyalahguna narkotika setelah menjalani proses penyelesaian perkara yang dituntut dan diputus dengan hukuman rehabilitasi;
      7) penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan penggunaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi;
      8) bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum; dan
      9) administrasi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.
   b. Pemantauan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Optimalisasi Kinerja

      Untuk itu perlu menugaskan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan melakukan koordinasi dengan Inspektur Keuangan serta seluruh bidang/badan untuk:
      1) melakukan evaluasi secara periodik pada setiap satuan kerja terkait dengan penyerapan anggaran dan capaian kinerja; dan
      2) melakukan revisi anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak terserap secara optimal dalam TA 2023.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis masing-masing bidang/badan Kejaksaan Tahun 2023 juga dapat disimpulkan sejumlah rekomendasi terkait dengan isu strategis

sesuai dengan prioritas di bidang masing-masing bidang dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, sebagai berikut:

a. Bidang Pembinaan:
   Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan.

b. Bidang Intelijen:
   1) meningkatkan kerja sama Komunitas Intelijen Pusat dan Daerah dalam rangka pemenuhan bank data intelijen dan pemetaan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap 75 (tujuh puluh lima) sektor permasalahan bidang intelijen;
   2) pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasi intelijen;
   3) internalisasi pola kerja agar lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam proses penegakan hukum; dan
   4) optimalisasi Program Jaga Desa, Pemberantasan Mafia Tanah, PPS, peran Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024, layanan informasi publik kepada masyarakat serta program-program lain di bidang intelijen penegakan hukum.

c. Bidang Tindak Pidana Umum:
   1) dalam penanganan perkara *cyber crime*, agar memanfaatkan secara efektif anggaran PN; dan
   2) dalam penanganan perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya penerapan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAPP) atau perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

d. Bidang Tindak Pidana Khusus:
   1) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang pelaksanaan *Corruption Impact Assessment* (CIA) guna memberikan solusi bagi perbaikan tata kelola untuk satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi objek tindak pidana korupsi;
   2) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang penerapan Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
   3) menyusun kajian terkait upaya meningkatkan PNBP dengan membuka peluang pembayaran kerugian keuangan negara.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:
   Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk meningkatkan peran Kejaksaan dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

f. Bidang Pidana Militer:
   1) penguatan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum dalam rangka optimalisasi kinerja dan penyerapan anggaran koordinasi teknis penuntutan;
   2) melakukan koordinasi non teknis penuntutan dalam rangka mewujudkan sinergi penanganan perkara koneksitas;
   3) mendorong pembentukan Tim Tetap Koneksitas melalui koordinasi intensif dengan satuan penegak hukum TNI, penyidik Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya; dan
   4) menyusun kajian pengembangan struktur organisasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

g. Bidang Pengawasan:
   1) percepatan penyelesaian penyusunan regulasi tentang kode perilaku jaksa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
   2) menyempurnakan dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu (E-PROWAS);
   3) menyusun langkah-langkah progresif untuk mengatasi permasalahan penyelesaian tunggakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK);
   4) berkoordinasi dengan BPK terkait penyelesaian temuan piutang uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, termasuk penyelesaian karena hapusnya kewenangan menjalankan pidana akibat kedaluwarsa dengan mendasarkan pada Pasal 84 KUHP;
   5) meningkatkan indeksasi terkait SAKIP dan SPIP; dan
   6) meningkatkan integritas aparatur Kejaksaan melalui pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

h. Badan Pendidikan dan Pelatihan:
   1) menyusun kajian kebutuhan anggaran, widyaiswara, tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan terhadap penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara pada tahun 2024;
   2) mempersiapkan langkah-langkah untuk penambahan Pendidikan dan Pelatihan *Refreshing Course* Pembaharuan KUHP Nasional;
   3) optimalisasi penguatan kurikulum integritas pada Bdan Pendidikan dan Pelatihan dengan cara menerapkan ISO: 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan prinsip *no bribery, no kickback, no gift,* dan *no luxurious hospitality.*

2. Kesempatan rapat konsolidasi tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialiasi tentang revisi Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta penyusunan IKI yang telah disusun oleh Biro Kepegawaian dan saat ini dalam proses meminta masukan dari seluruh bidang dan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:

a. mengusulkan dan menyusun draf Perubahan Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sesuai dengan Revisi Rencana Strategis yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2024; dan
b. mendorong percepatan masukan dari bidang-bidang terkait draf IKI yang telah disusun oleh Biro Kepegawaian, sehingga dapat diproses tindaklanjutnya oleh Biro Kepegawaian.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2024

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan.
   Diukur dengan: jumlah aparatur Kejaksaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan dan Integritas Aparatur Kejaksaan.
   Diukur dengan: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
   Diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
   Diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
   Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi.
   Diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Tahun 2020-2024.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki maka Kejaksaan mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari APBN yang selalu ditetapkan setiap tahunnya. Situasi nasional yang belum stabil mengingat pandemi Covid-19 dan dinyatakan menjadi endemi di tahun 2024, mengharuskan Kejaksaan untuk berhati-hati dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang diberikan dan harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini Kejaksaan yang harus memastikan terlaksananya penegakan hukum setelah menjadi endemi di tahun 2023.

Renja Kejaksaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Tahun 2023 memuat arah kebijakan Kejaksaan tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

1. Program Kejaksaan

   Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan, Kejaksaan mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Tahun Anggaran 2024, yaitu:

   a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

      Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

   b. Program Dukungan Manajemen

      Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 3 (tiga) eselon I, yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

   Untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, Kejaksaan telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-16/A/Cr.2/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp24.567.045.690.624,00 (dua puluh empat triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024

   Kejaksaan telah mengirimkan kebutuhan riil TA 2024 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui surat Jaksa Republik Indonesia Nomor: B-11/A/Cr.2/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Kebutuhan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, yang pada intinya mengajukan kebutuhan anggaran untuk TA 2024 sebesar Rp43.565.499.723.000,00 (empat puluh tiga triliun lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

   Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan RI TA 2024 sebesar Rp10.002.179.171.000,- (sepuluh triliun dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riil TA 2024 (Rp)	Pagu Indikatif TA 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.222.780.674.000	636.013.090.000	-586.767.584.000
2.	Program Dukungan Manajemen	42.342.719.049.000	9.366.166.081.000	-32.976.552.968.000
Jumlah		43.565.499.723.000	10.002.179.171.000	-33.563.320.552.000

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah (Rp)
1.	Rupiah Murni (RM)	8.181.903.540.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	376.300.000.000
3.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.124.433.750.000
4.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	319.541.881.000
Jumlah		10.002.179.171.000

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Persentase
1.	Belanja Pegawai	5.104.720.818.000	51,04%
2.	Belanja Barang	3.453.482.722.000	34,53%
3.	Belanja Modal	1.443.975.631.000	14,44%
Jumlah		10.002.179.171.000	100%

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif TA 2024 Untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2024

No.	Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	177.811.924.000
2.	Program Dukungan Manajemen	208.520.038.000
Jumlah		386.331.962.000

Hasil penyusunan Pagu Indikatif Kejaksaan TA 2024 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri, dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri pada Musrenbang Kejaksaan Tahun 2023 dan rapat *Trilateral Meeting* antara Kejaksaan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Mei 2023 anggaran Kejaksaan TA 2024 per program dan kegiatan PN yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 5
Pagu Indikatif TA 2024 Hasil Penyusunan Musrenbang
dan Rapat *Trilateral Meeting*

Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)	Pagu Indikatif 2024 Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	636.013.090.000	826.073.762.000	190.060.672.000
Program Dukungan Manajemen	9.366.166.081.000	9.176.105.409.000	-190.060.672.000
Jumlah	10.002.179.171.000	10.002.179.171.000	-

Tabel 6
Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	826.073.762.000
	a. Bidang Intelijen	104.504.539.000
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	323.662.387.000
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah	299.781.926.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	27.741.526.000
	e. Bidang Pidana Militer	17.544.440.000
	f. Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara	52.838.944.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.176.105.409.000
	a. Bidang Pembinaan	7.058.881.897.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.906.010.129.000
	c. Bidang Pengawasan	28.784.647.000
	d. Bidang atau Badan Pendidikan dan Pelatihan	182.428.736.000

Tabel 7
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program
Hasil Rapat Trilateral Meeting

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	33.376.188.000
2.	Program Dukungan Manajemen	96.694.773.000
	Jumlah	130.070.961.000

Tabel 8
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/ Volume	Satuan	Pagu (Rp)
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	205.050	Orang	20.6507.000.000
2.	Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa	300	Orang	2.100.000.000
3.	Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	400	Orang	2.800.000.000
4.	Bimbingan Teknis Peningkatan	320	Orang	2.458.250.000

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/ Volume	Satuan	Pagu (Rp)
	Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022			
5.	Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	60	Orang	820.000.000
6.	Penanganan Perkara Siber	225	Perkara	4.547.238.000
7.	Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I	1	Layanan	10.000.000.000
8.	Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Centre* (SOC) TA 2024	1	Unit	65.000.000.000
9.	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38	Laporan	8.800.000.000
10.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak	120	Orang	2.230.042 .000
11.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*	120	Orang	1.939.042.000
12.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset	120	Orang	1.939.042.000
13.	Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme	60	Orang	969.521.000
14.	Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum	120	Orang	1.939.042.000
15.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif	60	Orang	969.521.000
16.	Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	180	Orang	2.908.563
Jumlah				130.070.961.000

3. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 644/M.PPN/D.8/PP.04.02 /07/2023 dan Nomor: S-626/AG/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.407.179.171.000,00 (tujuh belas triliun empat ratus tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau naik sebesar Rp7.405.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus lima miliar rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan pada tanggal 10 April 2023. Tambahan anggaran sebesar Rp7.405.000.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus lima miliar rupiah) sesuai Lampiran III.a SBPA dipergunakan untuk:

a. pengadaan peralatan dan sarana prasarana dalam mendukung tusi Kejaksaan sebesar Rp6.075.000.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh lima miliar rupiah);
b. anggaran pendidikan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
c. anggaran kesehatan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

d. renovasi gedung bundar sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah).

Hasil penyusunan Pagu Anggaran Kejaksaan TA 2024 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri, dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri, serta Perwakilan Kejaksaan di luar negeri dan telah dilakukan penelaahan antara Kejaksaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 9 Agustus 2023, anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 per program dan kegiatan PN yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 9
Penyusunan Pagu Anggaran TA 2024 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Anggaran 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	826.073.762.000
	a. Bidang Intelijen	104.504.539.000
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	323.662.387.000
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Pusat dan Daerah	299.781.926.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	27.741.526.000
	e. Bidang Pidana Militer	17.544.440.000
	f. Pemeliharaan Barang Bukti Penanganan Perkara	52.838.944.000
2.	Program Dukungan Manajemen	16.581.105.409.000
	a. Bidang Pembinaan	7.058.881.897.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	9.311.010.129.000
	c. Bidang Pengawasan	28.784.647.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	182.428.736.000

Tabel 10
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program
Hasil Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	33.376.188.000
2.	Program Dukungan Manajemen	96.694.773.000
	Jumlah	130.070.961.000

4. Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp17.735.830.296.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang mengalami kenaikan sebesar Rp328.651.125.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran TA 2024 yang disampaikan pada tanggal 31 Juli 2023. Tambahan anggaran sebesar Rp328.651.125.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai

Lampiran I.a Surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2023 dipergunakan untuk:

a. kenaikan gaji pegawai sebesar 8% sejumlah Rp128.651.125.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
b. pengadaan perangkat peralatan intelijen sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Tabel 11
Anggaran Kejaksaan TA 2024

No.	Program	Pagu Indikatif 2024 (Rp)	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Pagu Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	636.013.090.000	826.073.762.000	826.073.762.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.366.166.081.000	16.581.105.409.000	16.581.105.409.000
Jumlah		10.002.179.171.000	17.407.179.171.000	17.735.830.296.000

Hasil penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan TA 2024 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 Kejaksaan Tinggi, 437 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri serta Perwakilan Kejaksaan di luar negeri dan telah dilakukan penelaahan antara Kejaksaan, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023, anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 per program dan kegiatan PN yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Per Program
Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2024 (Rp)
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	912.829.842.000
	a. Bidang Intelijen	106.446.113.000
	b. Bidang Tindak Pidana Umum	316.309.615.000
	c. Bidang Tindak Pidana Khusus	385.828.404.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	32.165.446.000
	e. Bidang Pidana Militer	19.056.440.000
	f. Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penyelesaian Barang Bukti	53.023.824.000
2.	Program Dukungan Manajemen	16.823.000.454.000
	a. Bidang Pembinaan	6.855.525.480.000
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana	9.752.901.436.000
	c. Bidang Pengawasan	30.143.647.000
	d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	194.429.891.000

Tabel 13
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program
Hasil Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	33.376.188.000
2.	Program Dukungan Manajemen	96.694.773.000
	Jumlah	130.070.961.000

Tabel 14
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/ Volume	Satuan	Pagu (Rp)
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	205.050	Orang	20.6507.000.000
2.	Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa	300	Orang	2.100.000.000
3.	Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	400	Orang	2.800.000.000
4.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	320	Orang	2.458.250.000
5.	Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	60	Orang	820.000.000
6.	Penanganan Perkara Siber	225	Perkara	4.547.238.000
7.	Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I	1	Layanan	10.000.000.000
8.	Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA. 2024	1	Unit	65.000.000.000
9.	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38	Laporan	8.800.000.000
10.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak	120	Orang	2.230.042 .000
11.	Diklat Teknis *Restorative Justice*	120	Orang	1.939.042.000
12.	Diklat Terpadu Pemulihan Aset	120	Orang	1.939.042.000
13.	Diklat Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme	60	Orang	969.521.000
14.	Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum	120	Orang	1.939.042.000
15.	Diklat Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif	60	Orang	969.521.000
16.	Diklat Tindak Pidana Lingkungan Hidup	180	Orang	2.908.563
	Jumlah			130.070.961.000

Penjelasan secara lebih detail terkait program dan rencana penggunaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1) Bidang Intelijen

Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen adalah sebesar Rp106.446.113.000,00 (seratus enam miliar empat ratus empat

puluh enam juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen baik di pusat dan di daerah antara lain:

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen antara lain:
   (1) Laporan Hasil Kegiatan Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan, serta Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana;
   (2) Laporan Hasil Kegiatan Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
   (3) Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan;
   (4) Laporan Hasil Kegiatan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen;
   (5) Kegiatan *Monitoring Center*;
   (6) Kegiatan Monitoring Sinyal;
   (7) Kegiatan *Digital Forensic*;
   (8) Kegiatan *Tactical Passive*;
   (9) Kegiatan Operasional Kontra Penginderaan dan *Scanning*;
   (10) Kegiatan Adhyaksa *Command Center*;
   (11) Laporan Hasil Kegiatan Rencana Aksi;
   (12) Operasi Intelijen Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
   (13) Posko Bandara/Pelabuhan;
   (14) Penerangan Hukum;
   (15) Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat;
   (16) Jaksa Menyapa di Radio dan Televisi;
   (17) Pelayanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum; dan
   (18) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan.

b) Kegiatan Bidang Intelijen di satker daerah dengan rincian antara lain sebagai berikut:
   (1) Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan;
   (2) Penelusuran Aset Terkait Tindak Pidana;
   (3) Posko Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos;
   (4) Pengamanan Pembangunan Strategis;
   (5) Penerangan Hukum;
   (6) Penyuluhan Hukum Berupa Jaksa Masuk Sekolah;
   (7) Penyuluhan Hukum Berupa Jaksa Menyapa/OmJak Menjawab di Melalui Radio/*Podcast*/Televisi;
   (8) Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
   (9) Kegiatan Pencarian Buronan;
   (10) Kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah); dan
   (11) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi.

2) Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum sebesar Rp316.309.615.000,00 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum baik di pusat dan di daerah.

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:

(1) Penanganan Perkara terhadap Orang dan Harta Benda;
(2) Penanganan Perkara terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya;
(3) Penanganan Perkara Siber;
(4) Penanganan Perkara terhadap Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara;
(5) Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
(6) Bimbangan Teknis Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
(7) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Melalui Keadilan Restoratif;
(8) Pelaksanaan *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi;
(9) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
(10) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

b) Untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker daerah yang akan dipergunakan untuk menangani 128.000 perkara di daerah serta 2.443 penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di 534 satker di daerah.

3) Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk bidang Pidana Khusus sebesar Rp385.828.404.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus baik di pusat dan di daerah.

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
(1) Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang;
(2) Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai;
(3) Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti;
(4) Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi Perkara;
(5) Prapenyidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat;
(6) Dukungan Kegiatan Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
(7) Pelaksanaan *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi;
(8) Pelacakan Aset Dalam Rangka Pembayaran/Pelunasan Piutang Uang Pengganti (Sita Eksekusi) dengan Menggunakan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
(9) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

b) Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada satker di daerah yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang telah memperhitungkan jarak dan medan yang ditempuh satker untuk sidang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di ibukota provinsi. Anggaran penanganan perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya terdiri dari 1.581 perkara penyelidikan, 1.109 perkara penyidikan, dan 1.217 perkara di tingkat prapenuntutan dan penuntutan di 534 satker di daerah dengan rincian per perkara antara lain:
   (1) Anggaran penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp29.800.000,00.
   (2) Anggaran penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp100.000.000,00.
   (3) Anggaran prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi sebesar Rp36.000.000,00.
   (4) Anggaran prapenuntutan dan penuntutan Wilayah I di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp45.000.000,00.
   (5) Anggaran prapenuntutan dan penuntutan Wilayah II di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp68.800.000,00.
   (6) Anggaran prapenuntutan dan penuntutan Wilayah III di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp118.980.000,00 sampai dengan Rp581.350.000,00.
   (7) Anggaran eksekusi Wilayah I di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp4.850.000,00.
   (8) Anggaran eksekusi Wilayah II di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp7.440.000,00.
   (9) Anggaran eksekusi Wilayah III di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp37.280.000,00.

4) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp32.165.446.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus enam puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di pusat dan di daerah.

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:
   (1) Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum;
   (2) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;
   (3) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
   (4) Biaya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Luar Negeri;
   (5) Pos Pelayanan Hukum;
   (6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menggunakan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

(7) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

b) Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di satker daerah, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 2.819 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 508 perkara, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 5.601 kegiatan.

5) Bidang Pidana Militer

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Militer sebesar Rp19.056.440.000,00 (sembilan belas miliar lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Pidana Militer baik di pusat dan di daerah.

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer antara lain:
   (1) Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas;
   (2) Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Koneksitas;
   (3) Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas;
   (4) Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas;
   (5) Penyelesaian Praperadilan Perkara Koneksitas; dan
   (6) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

b) 2) Untuk penyelesaian perkara koneksitas di satker daerah, terdiri dari kegiatan laporan dan pengaduan perkara koneksitas 120 perkara, penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas 20 perkara, serta prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas sebanyak 40 perkara.

6) Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penyelesaian Barang Bukti

Untuk menunjang kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, dan pidana militer pada satker Kejaksaan di daerah diperlukan biaya pemeliharaan, pemusnahan, dan penyelesaian barang bukti untuk satker di daerah sebesar Rp53.023.824.000,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen

1) Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp6.855.525.480.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)* yang telah mengakomodir kenaikan gaji pegawai sebesar 8%.

Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada Bidang Pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat intelijen,

anggaran rutin pada biro-biro dan pusat, serta anggaran operasional Rumah Sakit Adhyaksa.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp9.752.901.436.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana seluruh satker pusat dan daerah. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 15
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana TA 2024

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1.	*The Procurement of Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia* (*Cyber and Digital Forensic*) yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri	562.331.250.000
2.	*The Procurement of Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia (Big Data Intelijen*) yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri	187.443.750.000
3.	*The Procurement of Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia (Big Data Intelijen)* yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri	374.658.750.000
4.	Pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa (yang berasal dari SBSN)	221.583.000.000
5.	Biaya Fasilitas Pendukung Rumah Sakit Adhyaksa (Meubelair dan Tata Graha) (yang berasal dari SBSN)	9.458.000.000
6.	Peralatan Kesehatan Medis Rumah Sakit Adhyaksa (yang berasal dari SBSN)	88.500.881.000
7.	Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2024 (PN TA 2024)	65.000.000.000
8.	Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus (PN TA 2024)	10.000.000.000
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor/Rumah Dinas untuk 33 Satker	263.438.058.000
10.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran untuk 82 Satker	62.438.785.000
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Perkara untuk 33 Satker (yang berasal dari PNBP)	4.775.000.000
12.	Pengadaan Kendaraan Bermotor Fungsional Penanganan Perkara Militer dan Perkara Korupsi untuk 29 Satker	21.955.000.000
13.	Pengadaan Kapal Laut untuk Penanganan Perkara (yang berasal dari PNBP)	21.000.000.000
14.	Kendaraan Tahanan Baracuda	18.000.000.000
15.	Kendaraan Tahanan Satker Daerah (yang berasal dari PNBP)	70.122.000.000
16.	Fasilitas Perkantoran (Pengolah Data, CCTV, Kamera, Meubelair, Penghancur Kertas, AC, dan *Sound System*) di Kejaksaan Agung	5.000.000.000
17.	Mobil Dinas Listrik eselon I dan Bus Listrik serta Operasional Kantor (Mendukung Kebutuhan di IKN)	39.668.040.000
18.	Motor Dinas Listrik Operasional Kantor (Mendukung Kebutuhan di IKN)	560.000.000
19.	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi PNBP (yang berasal dari PNBP)	1.600.000.000
20.	Pemeliharaan Sistem Aplikasi e-Tilang, *Helpdesk*, *Setup* Konfigurasi (yang berasal dari PNBP)	350.000.000

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
21.	Pemeliharaan Sistem Aplikasi e-Piutang, *Helpdesk*, *Setup* Konfigurasi (yang berasal dari PNBP)	350.000.000
22.	Pemeliharaan Sistem Aplikasi e-RPL, *Helpdesk*, *Setup* Konfigurasi (yang berasal dari PNBP)	350.000.000
23.	Pengadaan Perangkat Pengamanan Diri 1 Paket	25.530.000.000
24.	Pengadaan Alat Kontra Penginderaan Selektif Jammer dan *Scanning Analizer Portable*	21.400.000.000
25.	Pengadaan Alat Pengolah Data Penanganan Perkara (*Scanner*)	28.500.000.000
26.	Pengadaan *Videotron* Lapangan Upacara Kejaksaan Agung	9.500.000.000
27.	Pengadaan Genset MEP Ceger	10.000.000.000
28.	Pengadaan Meubelair RSU Ceger	5.000.000.000
29.	Pengadaan Meubelair Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara	5.000.000.000
30.	Pengadaan Meubelair Inspektorat Keuangan	1.500.000.000
31.	Pengadaan *Interactive Board* untuk satker daerah	12.000.000.000
32.	Pengadaan Peralatan Pendukung Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	292.787.000
33.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran di Badan Pendidikan dan Pelatihan	596.135.000
Jumlah		2.147.901.436.000

Tabel 16
Tambahan Anggaran Sarana dan Prasarana
Pagu Anggaran TA 2024

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1.	Perangkat Sekuritas *Influential Personal* Berbasis *Interference Signal* pada Kejaksaan Agung	300.000.000.000
2.	Instrumen *Counter Measures* Penyebaran Berita Palsu pada Satker Kejaksaan Tinggi	350.000.000.000
3.	Pengadaan Perangkat Penjejakan *Global Positioning System Tracker Target*	300.000.000.000
4.	Perangkat Otentikasi Kartu Identitas Personil Kejaksaan	300.000.000.000
5.	Pengadaan Peralatan Intelijen Kartu TIK Digital dengan Basis Biometrik untuk Data Kriminal Kejaksaan	350.000.000.000
6.	Pengamanan Taktis Komunikasi *Interpersonal* Kejaksaan	350.000.000.000
7.	Pengadaaan Laboratorium Digital Forensik (*Integrated Digital Forensic Management System For Investigation*)	300.000.000.000
8.	Peralatan Keamanan Informasi dengan Peralatan Kontra Penyadapan Radio Frekuensi	200.000.000.000
9.	Pengadaan Alat Kontra Intelijen untuk Pengamanan *Very Very Important Person* Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	100.000.000.000
10.	Pengadaan Alat Kontra Intelijen untuk Pengamanan *Very Very Important Person* Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	100.000.000.000
11.	Pengadaan *Tactical Active* Intelijen *Monitoring Surveillance* Kejaksaan	200.000.000.000
12.	Pengadaan Perangkat Pengawasan Gedung, Pegawai dan Barang Bukti	200.000.000.000
13.	Perangkat Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejaksaan Negeri di DKI Jakarta dan Banten	250.000.000.000
14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyidik	200.000.000.000

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
	Kejaksaan Negeri	
15.	Peralatan Pengamanan Kantor di Ruang Publik di Kejaksaan Agung	250.000.000.000
16.	Pengadaan Peralatan Pengumpulan *Evidence* Berbasis Intelijen	300.000.000.000
17.	Pengadaan Peralatan Intelijen untuk Pencegahan Tindak Pidana	200.000.000.000
18.	Pengadaan Tahap II Peralatan Investigasi Analisis Strategis dan Identifikasi Target	100.000.000.000
19.	Pengadaan Tahap II Peralatan Intelijen Identifikasi dan Penelusuran Data Target	100.000.000.000
20.	Pengadaan Penguatan Sistem *Profiler* Kejaksaan Republik Indonesia	500.000.000.000
21.	Pengadaan *Surveillance Car With Tactical Passive Monitoring*	300.000.000.000
22.	Pembangunan Naratif *System* Berbasis BOT Wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	162.500.000.000
23.	Pembangunan Naratif *System* Berbasis BOT Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	162.500.000.000
24.	Pembangunan Naratif *System* Berbasis BOT Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	162.500.000.000
25.	Pembangunan Naratif *System* Berbasis BOT Wilayah Kejaksaan Tinggi Banten	162.500.000.000
26.	Pengadaan Jaringan Komunikasi Untuk Pengendalian Keselamatan Aparat Kejaksaan Tahap IV	75.000.000.000
27.	Peralatan Intelijen *Technical Surveillance Counter* Measure Tahap III	35.000.000.000
28.	Pengoptimalan *Monitoring Center* Kejaksaan	25.000.000.000
29.	Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Operasi Intelijen	40.000.000.000
30.	Pengadaan Peralatan Keamanan dan Investigasi Digital untuk Pengamanan dan Analisa Forensik pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000.000
31.	Pengadaan Sistem Tranformasi Digital Manajemen Terpadu pada Badiklat Kejaksaan	300.000.000.000
32.	Pengadaan Alat Kesehatan untuk RSU Adhyaksa Banten	275.000.000.000
33.	Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung untuk RSU Adhyaksa Banten	100.000.000.000
34.	Pengadaan Meubelair, Furnitur dan Interior RSU Adhyaksa Banten	125.000.000.000
35.	Renovasi Gedung Bundar Tindak Pidana Khusus	330.000.000.000
	Jumlah	7.405.000.000.000

Tabel 17
Tambahan Anggaran Sarana dan Prasarana
Pagu Alokasi Anggaran TA 2024

No.	Uraian Pengadaan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaan Sistem Survailans untuk Identifikasi dan Tangkap Buron	150.000.000.000
2.	Perangkat Nirawak Pemantauan dan Identifikasi	50.000.000.000
	Jumlah	200.000.000.000

3) Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah

Alokasi anggaran untuk Bidang Pengawasan sebesar Rp30.143.647.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang akan

dipergunakan untuk kegiatan pengawasan di pusat dan daerah yaitu:

a) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan antara lain:
   (1) Kegiatan Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi;
   (2) Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus;
   (3) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan; dan
   (4) Inspeksi Umum, Pemantauan, Inspeksi Pimpinan, Inspeksi Kasus, Inspeksi Khusus, Supervisi, *Video Conference* Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan Jajaran Pengawasan di Daerah, Pelaksanaan *Whistleblowing System*, Pelaksanaan Zona Integritas, Tim Saber Pungli, dan Satgas 53, serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
b) Kegiatan tugas dan fungsi peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah antara lain:
   (1) Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi;
   (2) Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus;
   (3) Pelaksanaan Inspeksi Umum dan Pemantauan; dan
   (4) Jumlah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi anggaran rutin untuk pendidikan dan pelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebesar Rp194.429.891.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk anggaran antara lain:

a) Belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, dan pramubakti).
b) Pendidikan dan Pelatihan PN;
c) Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
d) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
e) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
f) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional lainnya; dan
g) Program Pendidikan Beasiswa.

5. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Republik TA 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp17.735.830.296.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), untuk kegiatan Program PN Kejaksaan TA 2024 sesuai dengan kesepakatan hasil rapat *Trilateral*

Meeting sebelumnya pada pembahasan Pagu Indikatif TA 2024 yaitu sebesar Rp130.070.961.000,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 18
Pagu Prioritas Nasional TA 2024 Per Program

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	33.376.188.000
2.	Program Dukungan Manajemen	96.694.773.000
	Jumlah	130.070.961.000

Tabel 19
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/ Volume	Satuan	Pagu (Rp)
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	205.050	Orang	20.6507.000.000
2.	Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa	300	Orang	2.100.000.000
3.	Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	400	Orang	2.800.000.000
4.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	320	Orang	2.458.250.000
5.	Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	60	Orang	820.000.000
6.	Penanganan Perkara Siber	225	Perkara	4.547.238.000
7.	Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I	1	Layanan	10.000.000.000
8.	Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Centre* (SOC) TA. 2024	1	Unit	65.000.000.000
9.	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38	Laporan	8.800.000.000
10.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak	120	Orang	2.230.042 .000
11.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*	120	Orang	1.939.042.000
12.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset	120	Orang	1.939.042.000
13.	Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme	60	Orang	969.521.000
14.	Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum	120	Orang	1.939.042.000
15.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif	60	Orang	969.521.000

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/ Volume	Satuan	Pagu (Rp)
16.	Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	180	Orang	2.908.563
	Jumlah			130.070.961.000

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Renja Kejaksaan Tahun 2024 ini, diharapkan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan, serta Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, Inspektur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Atase Teknis Kejaksaan di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 untuk masing-masing bidang/unit kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing bidang/unit kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun dalam periode tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e*-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2024 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2024

I. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah SDM Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan	-	–	10.059.571.215.000	Jaksa Agung Muda Pembinaan
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri serta		• Jumlah Layanan Penelaahan, Perancangan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Kerja Sama Hukum dan Hubungan Luar Negeri • Jumlah Layanan	Koordinasi Penanganan Pelaksanaan Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	1 kegiatan	120.000.000	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
				Kerja Sama Hukum antara Kejaksaan RI	1 kesepakatan	403.735.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum		Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum • Jumlah Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri • Jumlah Layanan Perkantoran Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	dengan Kementerian/ Lembaga/Badan Asing			
				Penyusunan dan Pembahasan Kerja Sama antar Instansi Pemerintah/Badan/ Universitas	1 kesepakatan	198.000.000	
				Focus Group Discussion MLA dan Ekstradisi	1 orang	340.800.000	
				Keikutsertaan dalam Konferensi Internasional	1 kegiatan	327.844.000	
				Analisa dan Penyusunan Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan	1 layanan	698.565.000	
				Penelaahan dan Pemberian Pertimbangan Hukum	1 layanan	124.650.000	
				Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundangundangan	1 layanan	482.165.000	
				Layanan Perpustakaan	1 layanan	224.095.000	
				Layanan Dokumentasi Hukum	1 layanan	133.905.000	
				Layanan Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	25.000.000	
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia		• Jumlah Layanan Umum Kepegawaian • Jumlah Layanan Pengembangan Kepegawaian	Koordinasi antar Satuan Kerja dan antar Instansi dalam Pelaksanaan Pendidikan dan	1 kegiatan	102.000.000	Kepala Biro Kepegawaian

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Kepangkatan dan Mutasi Kepegawaian • Jumlah Layanan Pemberhentian dan Pensiun	Pelatihan Pegawai			
				Koordinasi dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	1 kegiatan	245.300.000	
				Kerja Sama antar Lembaga dan antar Instansi dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 kesepakatan	8.031.580.000	
				Sosialisasi Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	1 orang	178.550.000	
				Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	25270 orang	42.287.178.000	
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia			Layanan Perkantoran	1 layanan	692.804.058.000	Kepala Biro Keuangan
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen	15.644.212.000	
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen	8.473.474.000	
				Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	1.435.865.000	
				Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan	1 laporan	24.556.468.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia		• Meningkatnya Kegiatan Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Layanan Reformasi Birokrasi	1 rekomendasi kebijakan	2.764.600.000	Kepala Biro Perencanaan
				Layanan Pengelolaan Data	1 rekomendasi kebijakan	2.021.620.000	
				Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	3.653.960.000	
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen	38.925.904.000	
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen	2.975.850.000	
1084	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia		• Jumlah Layanan Kegiatan Analisis Kebutuhan • Jumlah Layanan Pengadaan • Jumlah Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara • Jumlah Layanan Perkantoran	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis LPSE	541 orang	297.600.000	Kepala Biro Perlengkapan
				Sosialisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	500 orang	151.900.000	
				Layanan Umum	1 layanan	4.603.640.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	74.811.323.000	
1085	Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, Kesehatan, dan Pembinaan Rohani, serta Kerumahtanggaan		• Jumlah Layanan Tata Usaha Umum dan Pimpinan • Jumlah Layanan Protokol dan Pengamanan Pimpinan • Jumlah Layanan Keamanan Dalam • Jumlah Layanan Kesehatan dan Pembinaan Rohani • Jumlah Layanan Rumah Tangga • Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Umum	1 layanan	14.137.406.000	Kepala Biro Umum
				Layanan Perkantoran	1 layanan	119.682.025.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1088	Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi		• Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal • Jumlah Layanan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi • Persentase Satuan Kerja yang Menggunakan CMS dalam rangka Implementasi SPPT-TI • Jumlah Layanan Perkantoran	Penyediaan *Link* Interkoneksi WAN untuk Layanan Akses Internet dan VPN Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 unit	70.000.000.000	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
				Layanan Umum	1 layanan	3.021.851.000	
				Layanan Perkantoran	1 layanan	12.626.904.000	
				Layanan Sarana Internal	1 unit	292.787.000	
				Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I	1 layanan	10.000.000.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13 unit	2.650.000.000	Pusat dan Daerah
				Layanan Sarana Intelijen	25 paket	6.275.000.000.000	
				Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia	1 paket	1.124.433.750.000	
				Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial	1 paket	819.541.881.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Sarana Internal	86 unit	272.780.040.000	
				Layanan Prasarana Internal	1 unit	330.000.000.000	
				Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2024	1 unit	65.000.000.000	
5276	Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerja Sama Pemulihan Aset Nasional maupun Transnasional		Penanganan Pemulihan Aset yang Terkait dengan Hasil Kejahatan	Layanan Sekretariat Pusat Pemulihan Aset	1 laporan	789.020.000	Kepala Pusat Pemulihan Aset
				Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38 laporan	8.800.000.000	
6773	Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		Jumlah Laporan	Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	1 rekomendasi kebijakan	2.371.710.000	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	1.400.000.000	Pusat dan Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Umum	1 layanan	1.400.000.000	Pusat dan Daerah

II. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	–	17.911.844.000	Jaksa Agung Muda Pengawasan
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Layanan Perkantoran		12 layanan	10.393.271.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Perkantoran	12 layanan	1.240.350.000	
				Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	180 orang	645.794.000	
				Tim Saber Pungli dan Satgas 53	1 dokumen	79.560.000	
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 dokumen	8.427.567.000	
6578	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan		Jumlah Laporan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	223.220.000	- Inspektur I - Inspektur II - Inspektur III - Inspektur IV - Inspektur V - Inspektur Keuangan
				Reviu Keuangan	1 dokumen	28.728.000	
				Inspeksi Khusus	33 dokumen	3.457.425.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui Klarifikasi Wilayah I sampai dengan V	40 dokumen	1.950.400.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus Wilayah I sampai dengan V	30 dokumen	1.858.800.000	

III. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	• Persentase Perkara Perdata yang Ditangani • Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	-	–	10.782.146.000	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
6581	Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung		Jumlah Laporan Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang	Pertimbangan Hukum yang Dilakukan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	100 perkara	797.350.000	- Direktur Perdata - Direktur Tata Usaha Negara

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		Perdata dan Tata Usaha Negara	Perkara Perdata yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80 perkara	1.259.250.000	- Direktur Pertimbangan Hukum
				Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80 perkara	1.259.250.000	
1120	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Perkantoran	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	1 laporan	7.466.296.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	–	2.047.240.000	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 layanan	2.047.240.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

IV. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	• Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	-	–	43.537.383.000	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
6579	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Bidang		Jumlah Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Bidang	Prapenuntutan Tindak Pidana Orang dan Harta Benda	125 perkara	256.250.000	- Direktur Tindak Pidana Terhadap

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Tindak Pidana Umum		Tindak Pidana Umum	Prapenuntutan Tindak Pidana Tindak Pidana Kamnegtibum dan TPUL	175 perkara	358.750.000	Orang dan Harta Benda, - Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, - Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
				Prapenuntutan Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara	150 perkara	307.500.000	
				Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika	200 perkara	410.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	450 perkara	21.696.485.000	
				Restorative Justice pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	2000 perkara	84.000.000	
				Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa	300 orang	2.100.000.000	
				Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	400 orang	2.800.000.000	
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor	320 orang	2.458.250.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				12 Tahun 2022			
				Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	60 orang	820.000.000	
				Penanganan Perkara Siber	225 perkara	4.547.238.000	
1109	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Perkantoran	Pelaksanaan *Focus Group Discussion*, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi	220.0 orang	2.545.365.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
				Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	33 laporan	5.153.545.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	–	2.951.923.000	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 layanan	2.951.923.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

V. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan,	• Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang	-	–	41.771.926.000	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Akuntabel, dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Hak Asasi Manusia Berat Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi	Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Prapenyidikan • Persentase Perkara				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan • Persentase Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Eksekusi • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri				
6580	Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		Persentase Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tahap Penyelidikan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	40 perkara	1.781.600.0	- Direktur Penyidikan - Direktur Penuntutan - Direktur Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tahap	40 perkara	7.988.940.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus			- Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
				Penanganan Perkara Praperadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	5 perkara	162.850.000	
				Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	40 perkara	3.594.900.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	25 perkara	6.132.470.000	
				Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Pencucian Uang dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	35 perkara	1.661.275.000	
				Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Pencucian Uang dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang	2 perkara	406.695.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Tindak Pidana Khusus			
				Pelaksanaan Eksaminasi Umum Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai	100 perkara	266.900.000	
				Pelaksanaan Eksaminasi Khusus Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai	35 perkara	6.362.959.000	
				Perkara Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Tahap Prapenyidikan, Penyidikan, Praperadilan, Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	5 perkara	300.370.000	
				Perkara Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Berat dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	1 perkara	45.313.000	
				Eksekusi Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	1 perkara	256.372.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Dukungan Kegiatan Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	1 perkara	3.000.000.000	
1115	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Perkantoran	Sosialisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkepastian Hukum	1050 orang	3.377.710.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
				Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	33 laporan	6.433.572.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	90.095.737.000	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 layanan	90.095.737.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

VI. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan terhadap *Major Project* Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang	-	-	26.582.026.000	Jaksa Agung Muda Intelijen

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum				
1087	Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		Jumlah Laporan	Kegiatan/Operasi Intelijen di Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan	130 laporan	1.278.900.000	Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
				Kegiatan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (PAKEM)	36 laporan	352.620.000	
1099	Operasi Inteliijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		Jumlah Kegiatan Intelijen di Bidang Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana	Kegiatan/Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara	120 laporan	2.479.000.000	Direktur Ekonomi dan Keuangan
				Kegiatan Penelusuran Aset Bidang Intelijen	15 laporan	414.000.000	
1100	Operasi Inteliijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Bidang		Persentase Hasil Kegiatan Pelaksanaan Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	Kegiatan Produksi Intelijen	18 laporan	187.600.000	Direktur Teknologi Informasi dan Produksi
				Kegiatan Pemantauan	147 laporan	2.854.510.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Intelijen			Kegiatan Sumber Daya Teknologi Informasi	24 laporan	364.000.000	Intelijen
				Kegiatan Pengamanan Informasi	42 laporan	409.200.000	
1101	Operasi Inteliijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		Persentase Hasil Kegiatan Pelaksanaan Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	Kegiatan/Operasi Intelijen Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	52 laporan	1.451.960..000	Direktur Ideologi Politik, Pertahanan dan Keamanan
				Kegiatan Pencegahan dan Penangkalan (CEKAL), Pengawasan Orang Asing (PORA), Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO), dan Penanganan Perkara	43 laporan	1.181.800.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung	17 orang	2.014.868.000	Kepala Pusat Penerangan Hukum
				Pelayanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung	37 orang	3.403.750.000	
				Pelayanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung	51 orang	102.904.000	
				Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung	2 lembaga	3.393.053.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri				
1112	Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		Jumlah Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	107 laporan	2.967.931.000	Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis
1104	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Perkantoran	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen	36 laporan	3.725.930.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	10.111.899.000	Jaksa Agung Muda Intelijen
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 layanan	10.111.899.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen

VII. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersertifikat Kompetensi	• Persentase SDM Kejaksaan Republik Indonesia yang Sesuai dengan Standar Kompetensi • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Persentase Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan • Jumlah SDM yang Bersertifikat Kompetensi	-	-	695.026.026.000	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1091	Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Pengadaan Peralatan Keamanan dan Investigasi Digital untuk Pengamanan dan Analisa Forensik pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (anggaran pendidikan)	31 unit	200.000.000.000	
				Pengadaan Sistem Transformasi Digital Manajemen Terpadu pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (anggaran pendidikan)	1 paket	300.000.000.000	
				Pengadaan Fasilitas Perkantoran	1 paket	596.135.000	
5008	Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia		Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Urusan Umum, Kepegawaian, Anggaran, Perbendaharaan, Pengelolaan Akuntansi, dan Verifikasi, serta Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi	Layanan Perkantoran	1 layanan	92.534.551.000	
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 dokumen	2.405.428.000	
6577	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	700 orang	51.303.398.000	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
				Layanan Pendidikan dan Pelatihan	604 orang	35.291.741.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak	120 orang	2.230.042.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*	120 orang	1.939.042.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset	120 orang	1.9393042.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme	60 orang	969.521.000	
				Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum	120 orang	1.939.042.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif	60 orang	969.521.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	180 orang	2.908.563.000	

VIII. RENCANA KERJA KEJAKSAAN AGUNG - JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TAHUN 2024

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia

Visi : Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Misi : Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indoneia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

SATKER: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	-	–	9.967.040.000	Jaksa Agung Muda Pidana Militer
6583	Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		Jumlah Laporan Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	Koordinasi Penindakan Perkara Koneksitas	50 kegiatan	903.700.000	- Direktur Penindakan - Direktur Penuntutan - Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi
				Koordinasi Penuntutan Perkara Koneksitas	40 kegiatan	722.960.000	
				Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum dan Eksaminasi Perkara Koneksitas	10 kegiatan	508.240.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyelidikan/Penyelesaian Laporan Pengaduan Perkara Koneksitas	8 perkara	1.073.160.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	8 perkara	1.692.472.000	
				Penyelesaian Praperadilan Perkara Koneksitas	5 perkara	103.150.000	
				Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Perkara Koneksitas	5 perkara	333.840.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas	8 perkara	1.177.680.000	
				Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Perkara Koneksitas	8 perkara	324.080.000	
6584	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Perkantoran	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer	1 laporan	3.136.758.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	1.500.000.000	Jaksa Agung Muda Pidana Militer
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 layanan	1.500.000.000	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht*		18.710.058.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	*van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara *online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO.	360.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	189.416.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.660.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	130.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	75.680.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	262.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	994.120.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	8.891.300.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	530.992.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	22.750.000	
				Dukungan Kegiatan	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai. • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri /Cabang Kejaksaan Negeri	60.000.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	133.300.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.920.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	101.980.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase koordinasi dan Kerja Sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Koordinasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	50.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/ Barang Rampasan	2.322.820.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	625.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	450.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	675.000.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana	38.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	9.700.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satuan Kerja yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian kinerja kejaksaan dengan		315.268.292.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Informasi Teknologi *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	1.070.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	94.680.071.000	
				Layanan Perkantoran	201.887.221.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	7.430.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	10.000.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu	100.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat		33.490.116.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	• Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO.	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	735.016.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	720.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	260.660.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	530.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	264.880.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.070.800.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.042.950.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	10.427.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	433.230.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	160.180.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan	Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	540.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	127.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	360.000.000	
				Koordinasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan	180.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi		
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/Barang Rampasan	2.702.270.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	153.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	241.380.0000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	5.500.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	405.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II.	1.651.200.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	25.05.400.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya	43.650.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	178.560.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	148.800.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi. • Persentase Satuan Kerja yang telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal		371.764.665.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	1.724.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	2.004.603.000	
				Layanan Perkantoran	366.957.612.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	637.450.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Indonesia			Layanan Prasarana Internal	10.000.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	340.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak		44.131.336.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tindakan Hukum Lain • Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.048.736.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	1.034.400.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	362.960.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan	75.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.		
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	760.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	378.400.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.529.300.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.114.650.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	12.576.182.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	761.470.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	64.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara	Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	727.544.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	190.656.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	507.000.000	
				Koordinasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	40.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/ Barang Rampasan	2.655.750.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	51.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	174.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.427.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	7.800.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	270.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	1.782.068.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	5.277.800.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya	2.910.0000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	505.920.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	14.880.000	
				Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satuan Kerja yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal		430.182.996.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	1.506.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	2.930.010.000	
				Layanan Perkantoran	424.207.986.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	840.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan
				Layanan Prasarana Internal	198.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Kejaksaan Republik Indonesia					Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	400.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak		8.942.246.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan,			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain • Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	189.416.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pemilihan Kepala Daerah)		
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.660.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	130.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	75.680.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	262.800.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi. • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	493.740.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.682.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	131.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan,	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	54.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	60.000.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	140.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	96.000.000	
				Koordinasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	40.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/ Barang Rampasan.	360.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	51.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana	31.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	625.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.589.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	495.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	137.600.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I.	68.230.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II.	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satuan Kerja yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal		159.380.350.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	352.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.778.259.000	
				Layanan Perkantoran	155.424.591.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.584.500.000	Kepala Kejaksaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia					Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	140.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak		62.208.036.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas.	Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsd*e (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan,			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	1.089.656.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	1.071.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	381.560.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	790.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	387.860.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.636.400.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.155.750.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	24.046.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	919.940.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan,	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.224.950.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	800.000.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	189.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	531.600.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	50.000.000	
				Koordinasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	29.800.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	180.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	40.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di	5.328.450.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi		
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/ Barang Rampasan	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	414.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.576.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	8.100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan	405.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				di Kejaksaan Tinggi		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1.513.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	5.943.840.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	550.560.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia. • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satuan Kerja yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan		476.682.804.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	1.769.775.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	3.966.980.000	
				Layanan Perkantoran	467.582.049.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	2.703.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	160.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	400.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI ACEH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak		36.231.950.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tindakan Hukum Lain • Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	707.736.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	700.800.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	242.060.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan	75.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri		
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	510.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	264.880.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.018.200.000	
6582	Penanganan dan		• Persentase Penyelesaian	Perkara Tindak	907.990.000	Kepala

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak	Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	12.123.750.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	433.140.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak	200.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya	Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	89.280.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	500.000.000	
				Koordinasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	117.600.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	333.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Penyidikan Perkara Koneksitas	30.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	29.800.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	100.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Barang Sitaan/Barang Rampasan	180.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.692.124.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	71.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan	282.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	2.294.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	5.100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	180.000.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam	225.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Rumah Tahanan Wilayah I		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	481.600.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	4.539.860.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	68.890.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	193.440.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/	14.880.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satuan Kerja yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan		221.520.968.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	1.218.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.726.415.000	
				Layanan Perkantoran	205.692.929.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	2.297.290.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	10.105.334.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	380.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		18.710.058.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	360.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	939.616.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	87.480.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	895.800.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	288.560.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	680.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	378.400.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.318.900.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.478.633.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	15.818.473.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.209.979.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	498.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.748.100.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	104.160.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak	82.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	586.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	141.600.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	399.600.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	50.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi		
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	32.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	3.406.440.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	294.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.488.980.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	5.538.310.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	951.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	515.100.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.027.150.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	46.400.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	238.080.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	74.400.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	94.720.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		315.268.292.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	1.641.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	3.470.258.000	
				Layanan Perkantoran	359.544.737.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	454.400.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	8.661.550.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	470.225.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.375.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan	40.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht*		25.230.146.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	*van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	571.336.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	581.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	176.960.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	410.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	236.500.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	791.800..000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	989.510.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	7.400.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	334.440.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan	Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	200.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	137.600.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/	353.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	84.000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	241.200.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang	1.319.470.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Bukti/Sitaan/ Rampasan		
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	112.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.788.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	723.440.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.195..880.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	292.090.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia. yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		251.686.102.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	897.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum.	3.427.772.000	
				Layanan Perkantoran	204.894.830.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.535.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	40.500.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	337.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan	32.900.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI RIAU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		22.830.724.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	380.376.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	3690.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	139.760.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	270.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	141.900.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	545.600.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	925.340.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	8.358.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan	530.960.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana	Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	78.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	140.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	600.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	239.900.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	377.500.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	164.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	280.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	64.800.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	188.400.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	2.144.578.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	70.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.162.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.315.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan	225.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	137.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.474.700.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana	119.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	298.240.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM		156.327.471.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	1.454.976.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.503.221..000	
				Layanan Perkantoran	151.627.774.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.200.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	200.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	240.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI JAMBI FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan		15.482.836.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	353.096.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	349.800.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	121.160.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	250.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejajksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	141.900.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	493.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan. • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	578.340.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.421.250.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	237.430.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	233.700.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	55.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	162.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.281.500.000	
				Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	83.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.132.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.700.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	481.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.079.550.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	124.440.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	119.040.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	25.250.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan*		124.313.107.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia. • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara. • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	616.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.132.048.000	
				Layanan Perkantoran	121.318.559.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	915.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	230.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht*		25.275.806.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Profesional • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	*van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	462.216.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	450.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	167.660.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	330.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	170.280.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	666.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	967.560.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	9.838.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	405.880.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan	71.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	137.600.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	14.880.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	320.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	79.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	228.000.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	50.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	40.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.617.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	51.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	87.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.519.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/	3.100.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	688.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.934.720.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	38.800.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	9.700.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	14.880.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik		226.545.182.000	Kepala Kejaksaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berrbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	1.256.200.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	870.700.000	
				Layanan Perkantoran	222.781.782.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.275.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	260.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di	30.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		19.644.104.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	475.856.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	475.200.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	158.360.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	340.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang telah	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	189.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	668.700.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	814.510.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5.728.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan	324.960.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi	Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	200.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	137.600.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana	14.880.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	320.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	74.4000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/	214.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri		
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	864.848.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	132.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.519.800..000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.403.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	383.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	412.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.811.720.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	41.390.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	96.720.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	81.840.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia sesuai Kebutuhan		215.138.162.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker Yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	714.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan
				Layanan Umum	1.228.556.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Negeri			Layanan Perkantoran	189.692.017.000	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	215.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	22.937.589.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	250.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat	30.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		22.256.470.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiata/ Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	380.376.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	376.800.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	130.460.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	270.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	151.360.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	533.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	960.044.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	6.520.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	326.920.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	260.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	60.000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	175.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.774.660..000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	94.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di	1.221.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.900.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	481.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.588.300.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	52.080.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	559.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesi yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan		129.198.226.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	589.760.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.084.314.000	
				Layanan Perkantoran	125.620.652.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.232.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	300.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu	270.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat	30.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		18.966.962.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	448.576.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	440.400.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	158.360.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	320.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	170.280.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	640.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	595.260.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5.085.556.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	646.680.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	320.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	74.400.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	214.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.215.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.460.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada	225.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	894.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.665.720.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus	49.770.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	83.090.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker		131.372.162.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia. • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	1.104.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.481.676.000	
				Layanan Perkantoran	127.049.986.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.145.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan
				Layanan Prasarana Internal	200.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Kejaksaan Republik Indonesia					Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	290.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		23.667.013..000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan. • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana. • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	407.565.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	396.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	149.060.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	290.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	151.360.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	586.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.007.350.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	7.506.258.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	798.552.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	300.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.	69.600.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	201.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas. • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	50.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.759.037.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	87.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di	1.341.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	542.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	550.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/	2.912.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	43.650.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	44.640.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	402.560.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		147.322.382.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	651.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.497.720.000	
				Layanan Perkantoran	144.082.662.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	730.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	260.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan	40.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Negeri		
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		19.007.180.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselesaikan pada tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	298.536.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	288.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	111.860.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	210.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	113.520.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	485.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	560.312.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5.883.962.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	294.210.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	23.600.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	220.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	50.400.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	148.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	60.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.653.710.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	43.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di	983.400..000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.300.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	315.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	3.370.780..000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	33.950.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	521.920.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan		157.266.692.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	458.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.356.737.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Negeri			Layanan Perkantoran	106.500.455.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	21.550.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	27.000.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu	300.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transpran, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		23.631.546.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi. • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	380.376.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	376.800.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/	130.460.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	270.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	151.360.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	533.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	699.700.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5.342.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	232.680.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	260.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	60.000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	175.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	.	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.203.200.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	223.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di	1.221.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.900.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	7.191140.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	820.160.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan		134.319.625.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	538.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan
				Layanan Umum	3.262.238.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Negeri.			Layanan Perkantoran	112.718.387.000	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	430.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	17.000.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	270.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat	30.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		26.255.595.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	516.776.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	558.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	121.160.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	370.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	255.420.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	662.280.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang	Perkara Pidana Tindak Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	583.280.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Pidana Tindak Umum dalam tahap Prapenuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5.175.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	240.350.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	240.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	55.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	162.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/	1.409.399.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Rampasan		
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	111.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.490.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.900.000.00	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di	225.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	8.203.200.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	1.192.960.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		133.790.295.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	785.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum.	1.275.290.000	
				Layanan Perkantoran.	125.857.375.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	741.030.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	5.000.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	30.600.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang	40.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri		
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		45.592.006.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	360.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	793.616.000	
				Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	795.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	242.060.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	607.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	331.100.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.116.900.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.032.910.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	11.050.070.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	534.200.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	90.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	653.740.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan	84.260.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	493.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	118.000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	340.200.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	50.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	40.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.693.500.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	51.000.000	
				Restorative justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	240.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.503.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di	5.600.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1.058.740.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	344.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	12.421.890.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	29.100.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	37.200.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	1.491.200.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber		285.087.703.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah layanan perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan VSAT	1.470.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan
				Layanan Umum	4.606.935.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Negeri			Layanan Perkantoran	275.592.268.000	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia.		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	2.577.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	350.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	390.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif. • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		19.810.226.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	325.816.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	315.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	121.110.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	230.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	122.980.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	464.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pid Tindak ana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	644.470.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	5.087.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	170.080.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	101.040.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	24.250.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/	240.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	55.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	162.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.674.900.000	
				Restorative justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	85.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.072.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di	2.500.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.858.560.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	671.040.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		103.648.076.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	537.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.415.252.000	
				Layanan Perkantoran	100.691.664.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia.		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	620.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	282.660.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI MALUKU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara Yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif. • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		15.481.613.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	366.736.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	375.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	111.860.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	260.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	160.820.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	494.900.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi. • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	647.256.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.810.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	192.661.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	220.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	50.400.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	148.800.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	60.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	40.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.320.130.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	51.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	93.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.132.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di	2.800.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III.	225.000.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	782.880.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan		112.511.444.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	586.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.127.130.000	
				Layanan Perkantoran	103.870.329.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.905.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	4.601.485.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	320.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BALI FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		13.557.641.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	312.176.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	45.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	305.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	111.860.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	220.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	122.980.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	438.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	731.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	4.040.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	187.500.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	130.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	220.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	50.400.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	148.800.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	50.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	630.235.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	52.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.013.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	945.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	275.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	126.220.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	82.450.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	29.760.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	7.440.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang telah Memenuhi Jumlah Sumber		178.008.349.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	490.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan
				Layanan Umum	2.744.905.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Negeri		• Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	148.712.657.000	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	25.732.725.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	47.062.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	180.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		12.261.157.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	243.976.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	234.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	93.260.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	170.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	94.600.000	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	343.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	583.911.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.737.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	148.620.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Ke jaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	400.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.107.360.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	101.040.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan	173.370.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	180.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	40.800.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	122.400.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	700.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	804.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.506.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	275.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.107.360.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	29.760.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	149.120.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi		107.278.954.000	Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia. • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen		• Jumlah Layanan Dukungan	Penambahan Layanan	409.000.000	Kepala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT		Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.250.719.000	
				Layanan Perkantoran	104.668.235.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	650.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	200.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri.	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI PAPUA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		19.299.342.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	243.976.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	32.496.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	234.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	93.260.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	170.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	94.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	343.600.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	668.120.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.919.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	178.100.000	
				Dukungan Kegiatan	74.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai di	Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	102.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	198.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	60,000,000	
				Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan	122.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri		
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	76.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas.	50.000.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas.	110.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	200.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	60.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	740.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	51.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	67.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian	450.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	900.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.204.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	375.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	5.432.640.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	447.360.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi		81.464.630.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi,		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan	464.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Langganan VSAT		Kejaksaan Negeri
				Layanan Umu	951.673.000	
				Layanan Perkantoran	78.425.757.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.200.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	270.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	61.920.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	60.780.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *In kracht van gewisjdezaak* (Berkekuatan Hukum Tetap)		31.680.276.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayaanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayaanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	544.056.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala	538.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Daerah)		
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	186.260.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	390.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	208.120.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	775.800.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan	Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	942.925.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5.959.423.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan	404.220.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di	Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	380.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan	88.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Presentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaaan Barang Rampasan	Negeri		
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	254.400.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	30.000.000	
				Penyelidikan Perkara Koneksitas	29.800.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	100.000.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	20.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.802.922.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	71.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	136.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.758.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.100.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	137.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Timur	10.424.640.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah I	98.810.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II	14.880.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	1.118.400.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan Dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal		151.699.192.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan Vsat	718.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	985.985.000	
				Layanan Perkantoran	128.327.347.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.229.860.000	Kepala Kejaksaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia			Layanan Prasarana Internal	20.000.000.000	Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	337.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Keiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		13.446.576.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan/ Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	325.816.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah).	315.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	121.160.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	230.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	122.980.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	464.800.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	668.120.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	4.919.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	456.830.000	
				Perkara Tindak Pidana	3.583.640.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana	Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	228.600.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	111.370.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	51.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	240.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	55.200.000	
				Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	162.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	767.370.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	69.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.072.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	225.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	825.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan	725.520.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	133.920.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang		99.696.682.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Teknologi Informasi. • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	468.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.186.534.000	
				Layanan Perkantoran	96.695.648.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia.		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.045.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unit Organisasi Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	200.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		18.363.786.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	325.816.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	315.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	121.160.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	230.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	122.980.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	464.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	487.660.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.895.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	194.200.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	405.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	6.285.060.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak	101.040.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Ditahan dalam Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	695.290.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	240.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	55.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan	162.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Hukum/ Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.		
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	1.129.600.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	45.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.072.800.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	37.500.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural		81.949.655.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi. • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			Kejaksaan Negeri
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi,		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan	539.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Langganan VSAT		Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.063.762.000	
				Layanan Perkantoran	74.949.993.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	695.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	4.360.500.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unit Organisasi Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	250.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BANTEN FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan. • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		16.012.576.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	243.976.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	234.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	93.260.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	170.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	94.600.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	343.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	895.390.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	7.857.585.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	306.600.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	159.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	40.800.000	
				Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	122.400.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	984.535.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	*Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	49.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	804.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.900.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	585.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	275.200.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	63.050.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	29.760.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi		124.745.774.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	744.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Cabang Kejaksaan Negeri		Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Umum	884.824.000	Negeri
				Layanan Perkantoran	120.835.950.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	2.000.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unit Organisasi Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	180.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	40.400.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen Yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		11.913.491.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	645.890.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.532.170.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	172.475.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	500.000.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	180.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	180.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	40.800.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	122.400.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindakn Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh jajaran kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	434.200.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	60.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	820.150.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.502.200.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	225.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	275.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1.158.920.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	24.250.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan	66.960.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas. • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Negeri		
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	149.120.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	101.040.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	645.890.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Neger	3.532.170.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	172.475.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di	74.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	51.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	500.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	180.000.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan	82.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Wilayah I		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	180.000.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	40.800.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	122.400.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal		85.319.168.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	565.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.292.936.000	
				Layanan Perkantoran	82.509.832.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	670.500.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia					Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu	190.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Meningkatnya Penyelesaian	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah		8.760.792.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus. • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan /Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	216.696.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah).	207.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	83.960.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	150.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	85.140.000	
				Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	303.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	585.010.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.970.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	108.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	160.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	36.000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	109.200.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	399.976.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	*Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	52.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	715.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.700.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	405.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	137.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	483.120.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	48.830.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	44.640.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak	101.040.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Ditahan dalam Rumah Tahanan		
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan.* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari		82.236.927.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	360.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	560.295.000	
				Layanan Perkantoran	63.304.654.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia.		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1.723.115.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	16.000.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit Reviu	197.963.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi,	30.300.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		20.200.289.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	257.616.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	259.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	83.960.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	180.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	113.520.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	345.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	753.320.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	3.424.585.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	460.208.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	160.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	36.000.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	109.200.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	3.201.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	*Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	45.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	804.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.000.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	2.730.400.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/	137.600.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	4.069.450.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	24.250.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	424.960.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi		76.616.669.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
1090	Dukungan Manajemen		• Jumlah Layanan Dukungan	Penambahan Layanan	400.000.000	Kepala

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT		Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	1.601.550.000	
				Layanan Perkantoran	73.736.866.000	
1091	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	227.353.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	300.000.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit *Reviu*	260.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000	
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		13.166.386.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	189.416.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	25.680.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	180.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.660.000	
				Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	75.000.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	130.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	75.680.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	262.800.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	14.880.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	140.000.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	31.200.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata	96.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian	dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	335.000.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	49.500.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	625.800.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	800.000.000	
				Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Penyelidikan Perkara Koneksitas	1.008.620.000	
				Penyidikan Perkara Koneksitas	115.920.000	
				Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	44.640.000	
				Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	14.880.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	82.500.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	140.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.200.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	96.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	335.000.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan		128.764.450.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	466.710.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	515.859.000	
				Layanan Perkantoran	53.496.861.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	430.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Prasarana Internal	73.563.600.000	
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unit Organisasi Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit *Reviu*	180.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang	20.640.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri		
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	60.780.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan		8.042.872.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan penyelesaian Perkara Koneksitas	Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	80.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	264.416.000	
				Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	62.633.000	
				Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	72.500.000	
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah)	180.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.660.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	130.000.000	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi,	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	18.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	75.680.000	
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	262.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri			
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	450.718.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1.669.700.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	91.925.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	74.200.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	51.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum	di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	700.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	260.580.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	14.880.000	
				Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan	82.500.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			• Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas. • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	140.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	31.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	96.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	335.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	49.500.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di	625.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	800.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	180.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	1.008.620.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	115.920.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III	44.640.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi. • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	• Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang Memiliki Sarana dan Prasarananya sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan		57.153.767.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	445.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	572.870.000	
				Layanan Perkantoran	52.585.437.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	3.300.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Persentase Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung di Daerah	Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, dan Audit *Reviu*	179.960.000	Kepala Kejaksaan tinggi
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	10.200.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000	
				Audit Perhitungan Kerugian Negara yang Dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan • Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif • Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan • Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis • Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen • Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum • Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif • Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan		7.244.447.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional • Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata • Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain • Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas	Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat • Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara *Online* di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi • Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi • Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata • Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen • Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi • Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana • Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO) • Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	109.120.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, dan P emilihan Kepala Daerah)	108.000.000	
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	37.200.000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/	80.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Cabang Kejaksaan Negeri		
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		• Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum • Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Laporan Kerja Sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum • Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Jumlah Lembaga Pendidikan yang Diberikan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi • Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Lembaga yang telah Diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	37.840.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	161.600.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Prapenuntutan	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	79.850.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Penuntutan • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam Tahap Eksekusi • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif • Persentase Penyelesaian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak	Perkara Tindak Pidana Umum Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2.211.300.000	
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	254.497.000	
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	80.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	19.200.000	
				Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	52.800.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Pidana Korupsi • Persentase Penyelesaian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Persentase Penyelesaian Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai • Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kejaksaan Tinggi • Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri • Persentase Pemberian Pertimbangan Hukum • Jumlah Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis • Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas • Persentase Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Perkara Koneksitas • Persentase Prapenuntutan	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/ Rampasan	251.000.000	
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	15.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	357.600.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	800.000.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	2.190.160.000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana	298.240.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			dan Penuntutan Perkara Koneksitas • Persentase Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas • Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan	Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III		
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	101.040.000	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik	• Manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah Memiliki Sertifikat Sesuai Standar Kompetensi • Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi • Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan • Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal • Jumlah Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM • Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan dengan IT *Master Plan* • Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara • Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara • Persentase Satker yang	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan dalam Rumah Tahanan	21.991.678.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		Indonesia.	Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan • Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan • Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Jumlah Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		• Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I • Jumlah Layanan Dukungan Satker • Jumlah Layanan Perkantoran	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan, dan Langganan VSAT	140.000.000	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
				Layanan Umum	101.706.000	
				Layanan Perkantoran	21.749.972.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI BANGKOK FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	–	2.097.308.000	Kepala Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Bangkok
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, dan Kerja Sama Hukum		• Jumlah Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri • Jumlah Layanan Perkantoran Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	Layanan Perkantoran	1 layanan	907.780.000	
				Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	1 layanan	1.189.528.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia.	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	2.508.958.000	Kepala Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Hong Kong
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, dan Kerja Sama Hukum		• Jumlah Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri. • Jumlah Layanan Perkantoran Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	Layanan Perkantoran	1 layanan	810.317.000	
				Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	1 layanan	1.503.641.000	
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Republik Indonesia		Jumlah Laporan	Layanan Sarana Internal	1 unit	195.000.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI RIYADH FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	2.161.302.000	Kepala Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Riyadh
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, dan Kerja Sama Hukum		• Jumlah Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri • Jumlah Layanan Perkantoran Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	Layanan Perkantoran	1 layanan	699.124.000	
				Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	1 layanan	1.462.178.000	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

SATKER: PERWAKILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	VOLUME/ SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	• Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	-	-	2.092.058.000	Kepala Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Singapura
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, dan Kerja Sama Hukum		• Jumlah Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri. • Jumlah Layanan Perkantoran Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	Layanan Perkantoran	1 layanan	752.500.000	
				Layanan Hukum pada Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri	1 layanan	1.339.558.000	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN